

Judul : 4000 ASN akan dilibatkan sebagai komponen cadangan
Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

4.000 ASN Akan Dilibatkan Sebagai Komponen Cadangan

Menteri Pertahanan Sjaifrie Samsuodindin memastikan sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian dan lembaga di Jakarta akan dilibatkan sebagai Komponen Cadangan (Komcad). Pelatihan direncanakan mulai berlangsung pada semester pertama 2026.

"Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih dan untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang," kata Sjaifrie, dikutip dari ANTARA, Senin (2/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Sjaifrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti kegiatan retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM Pertahanan) di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/1/2026).

Menurut Sjaifrie, pelibatan ASN dalam Komcad bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa cinta Tanah Air dalam pengabdian kepada

negara. Program ini menyasar ASN berusia 18 hingga 35 tahun yang akan mengikuti pelatihan dasar militer.

Setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan dasar tersebut, para ASN akan dikembalikan ke instansi dan lembaga masing-masing untuk melanjutkan tugas dan fungsi utamanya sebagai pelayan publik.

Sjaifrie menjelaskan, pelatihan Komcad ASN akan dilaksanakan secara bertahap. Skema pelatihan dibagi per triwulan agar dalam satu semester pertama pemerintah sudah memiliki jumlah komponen

cadangan yang memadai.

"Kita bagi setiap triwulan sehingga nanti pada saat semester pertama kita sudah mempunyai komponen cadangan cukup besar. Itulah proyeksi bagaimana negara harus mempertahankan dirinya," ujar Sjaifrie.

Rencana pelibatan ASN sebagai Komcad ini menjadi bagian dari kebijakan pertahanan negara yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, baik militer maupun nonmiliter.

Mantan pimpinan Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha mengatakan, aturan tersebut sudah diatur oleh undang-undang dan sudah sesuai. Sebenarnya Komcad itu semestinya sudah berlangsung dari dulu. Ini merupakan bagian dari bela negara.

Sementara itu, Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menilai kebijakan tersebut bermasalah sejak dari aspek hukum hingga dampaknya terhadap demokrasi.

Berikut petikan wawancara dengan Syaifullah Tamliha dan Ardi Manto Adiputra terkait rencana 4.000 ASN dilatih Komcad.

ARDI MANTO ADIPUTRA, Direktur Imparsial

SYAIFULLAH TAMLIHA, Mantan Pimpinan Komisi I DPR RI

Bisa Berbahaya Bagi Demokrasi & Hukum

Banyak Negara Maju Berlakukannya Aturan Ini



Indonesia memiliki sejarah kelam terkait keterlibatan militer dalam urusan-urusan masyarakat sipil. Karena itu, kebijakan seperti ini seharusnya dihindari.



Saya kira tidak berlebihan. Komcad ini disiapkan untuk menghadapi situasi dan kondisi tertentu, terutama jika negara berada dalam keadaan darurat atau perang.

Pemerintah berencana membangun Komcad dari ASN sebanyak 4.000 orang. Bagaimana tanggapan Anda?

Komcad sesungguhnya telah bermasalah sejak awal pembentukannya. Dalam konteks ASN yang akan dijadikan Komcad, pemerintah gagal menjelaskan secara terang apakah kebijakan ini bersifat sukarela atau justru wajib. Ketidaktepatan ini berbahaya karena menyangkut hak warga negara.

Bagaimana jika Komcad ASN ini bersifat wajib?

Jika program ini bersifat wajib, maka secara jelas bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UU PSDN Nomor 23 Tahun 2019 yang secara eksplisit menyebut bahwa Komcad bersifat sukarela. Kebijakan wajib juga bertentangan dengan prinsip *conscientious objection*, yaitu hak untuk menolak pengisian militer ber-

dasarkan keyakinan, agama, atau hati nurani yang dijamin oleh Konstitusi. Namun UU PSDN tidak secara eksplisit mengatur *conscientious objection*.

Bagaimana Anda melihatnya?

Meski UU PSDN tidak secara eksplisit mengakui *conscientious objection*, hak tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia. Ironisnya, UU PSDN justru membuka ruang kriminalisasi bagi warga yang menolak pengisian militer dengan alasan agama, yang jelas bertentangan dengan standar HAM internasional.

Bukankah ASN berkaitan dengan

pelayanan publik, bukan pertahanan? ASN pada dasarnya berorientasi pada urusan-urusan sipil, seperti pelayanan publik dan implementasi kebijakan publik. ASN tidak didesain sebagai alat pertahanan negara. Mewajibkan ASN menjadi Komcad merupakan bentuk nyata militerisasi ruang sipil, yang sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan prinsip negara hukum.

Apa dampak paling serius dari kebijakan ini?

Catatan paling krusial adalah risiko normalisasi kehadiran militer di ruang sipil. Melatih ASN dalam skema Komcad akan mengikis batas antara fungsi sipil dan militer. Ini juga memperkuat kecenderungan negara menggunakan pendekatan militer sebagai solusi instan atas persoalan tata kelola publik, yang jelas merupakan kemunduran dalam agenda reformasi sektor keamanan. ■ **REN**

Bagaimana tanggapan Anda terkait sikap pemerintah yang akan melatih 4.000 ASN sebagai Komponen Cadangan?

Iu sudah diatur oleh undang-undang dan sudah sesuai. Sebenarnya Komcad itu semestinya sudah berlangsung dari dulu. Ini merupakan bagian dari bela negara. Apalagi ASN itu aparatur negara, jadi sangat wajar kalau mereka dilatihkan.

Sebagian pihak menilai kebijakan ini berlebihan. Apa pendapat Anda?

Saya kira tidak berlebihan. Komcad ini disiapkan untuk menghadapi situasi dan kondisi tertentu, terutama jika negara berada dalam keadaan darurat atau perang. Dengan adanya Komponen Cadangan, negara memiliki pasukan tambahan yang sudah siap dan terlatih.

Apakah pertahanan negara se-

lahu identik dengan perang?

Tidak. Pertahanan negara itu luas. Bukan hanya soal perang, tapi juga bagaimana kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan, dan semangat bela negara. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan negara, dan Komcad adalah salah satu instrumennya.

Ada juga yang mempersoalkan jika Komcad dari ASN ini jadi dilaksanakan. Menurut Anda, tidak ada masalah?

Tidak ada masalah. Anggarannya sudah disiapkan dan dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi secara administrasi dan keuangan sudah *clear*.

Bagaimana jika Komcad ini sifatnya sukarela, bukan wajib?

Kalau sifatnya sukarela, biasanya program seperti ini tidak akan jalan. Tidak jadi jadi dan akhirnya tidak ter-

laksana. Lagi pula ASN itu dibayai oleh negara. Jadi wajar kalau negara juga meminta kontribusi mereka dalam konteks pertahanan.

Banyak yang membandingkan Komcad dengan wajib militer. Apakah itu tepat?

Kurang lebih memang dilihat seperti wajib militer. Banyak negara maju juga sudah memberlakukan wajib militer atau sistem cadangan. Jadi ini bukan hal yang aneh dalam konteks pertahanan negara.

Bagaimana dengan pola dan bentuk pelatihannya?

Tentu kita berharap pelatihan Komcad dilakukan bersama TNI, dengan standar latihan militer. Tapi harus disesuaikan juga. Dari segi fisik jelas ada perbedaan. Jangan disamakan dengan pasukan elite seperti Kopassus, kasian nanti. ■ **REN**